

**KUALITAS INFORMASI WEBSITE SEBAGAI APLIKASI E GOVERNMENT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI
PAPUA**

Wulandari Dwi Puspitarini
NPP. 30.1510

Asdaf Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: wulandariandari21@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author's focus is on the problems related to the quality of information available on websites in the local government of Jayapura Regency. The website plays a crucial role in supporting the success of E-Government initiatives. **Purpose:** The purpose of this research is to assess the quality of website information in Jayapura Regency and identify the factors that influence the quality of information presented on these websites. **Method:** The study employs a descriptive qualitative method, utilizing Carlo Batini's Theory of information quality. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. **Result:** The findings reveal that the dimensions of information quality are not fully met on the two websites studied. On the Jayapura Regency Government Website, there are deficiencies in the accuracy dimension, specifically in the currency and timeliness indicators. Additionally, the completeness and accessibility dimensions are not fulfilled. Regarding the Office of Communication and Informatics website, it does not meet the standards primarily due to the timeliness indicator in the accuracy dimension. Inhibiting factors affecting the quality of information on the Jayapura Regency Government website include the lack of expert staff, inadequate budget, insufficient coordination among regional apparatuses, and limited public awareness of the existence of the Jayapura Regency Government website. **Conclusion:** The quality of website information on the examined websites is considered satisfactory, but there is room for improvement. Collaborative efforts among regional apparatuses, training programs related to website management, and content evaluation are suggested as measures to enhance the quality of information provided on the websites.

Keywords: *Website; information quality; Jayapura Regency*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan terkait kualitas informasi yang ada pada website di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dimana website sendiri dapat menjadi salah satu pendukung keberhasilan *E Government*. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas Informasi website yang ada pada Kabupaten Jayapura dan faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam website tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori kualitas informasi menurut Teori Carlo Batini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Pada 2 website yang diteliti ditemukan dimensi kualitas informasi yang tidak memenuhi dimana pada *Website* Pemerintah Kabupaten Jayapura, masih terdapat kekurangan pada dimensi *accuracy* dimana indikator yang tidak terpenuhi adalah *currency* dan *timeliness*. Selanjutnya pada dimensi *completeness* dan dimensi *Accessibility* juga belum memenuhi. Untuk *website* Dinas Komunikasi dan Informatika yang belum memenuhi standar adalah indikator *timeliness* pada dimensi *accuracy*. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi kualitas informasi website Pemerintah Kabupaten Jayapura adalah kurangnya staff ahli, anggaran tidak memadai, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan website Pemerintah Kabupaten Jayapura. **Kesimpulan:** Kualitas Informasi website pada website yang diteliti sudah baik meski masih ada yang harus diperbaiki. Kerjasama antar perangkat daerah, pelatihan terkait dengan pengelolaan website serta evaluasi konten di dalam website menjadi hal yang disarankan untuk meningkatkan kualitas informasi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Kata kunci: *Website*; kualitas informasi; Kabupaten Jayapura

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi dalam wilayah daratan dan lautan dimana dalam pembagiannya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa setiap wilayah di Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota dimana dalam tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dimana pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan tetap mengacu pada Undang-Undang yang berlaku. Pembagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Pemerintah daerah selaku pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah, menjalankan tugas dan fungsinya dengan tetap mengikuti perkembangan zaman. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah E-Government.

E-Government hadir untuk memberikan pelayanan baik secara publik maupun privat berbasis elektronik agar dapat mencapai pelayanan yang efektif dan efisien serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Pada lingkungan kerja pemerintahan, Pemanfaatan teknologi ini mencakup aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen, data, informasi dan proses kerja secara digital serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Menjalankan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Pengembangan E-Government, setiap pemerintah daerah mengembangkan E-Government yang beragam. Pemerintah

daerah Provinsi Papua khususnya Kabupaten Jayapura, mengembangkan aplikasi E-Government berupa website resmi pemerintahan daerah. Situs website ini dibangun sebagai media penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat dimana setiap website pemerintah daerah berisi kumpulan informasi kedaerahan yang terangkum dalam sebuah domain/subdomain- domain maupun subdomain terhubung dengan jaringan internet sehingga dapat diakses oleh seluruh pengguna selama terkoneksi dengan jaringan internet. Survey yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura pada tahun 2021 menunjukkan kurang lebih 85% masyarakat Kabupaten Jayapura telah dapat menerima informasi melalui televisi, radio, surat kabar, majalah dan penyuluhan serta telah tersebar BTS dari berbagai provider yang dapat sampai hingga ke kampung kampung sehingga masyarakat dapat mengakses internet dan menerima informasi secara online.

Keberadaan situs web menjadi perangkat yang strategis dalam menjalankan aktivitas pemerintahan dimana salah satu pemanfaatannya adalah sebagai online public relation (Wiratmo, Irfan, & Kuwatono, 2017). Keberadaan Situs website pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yang berkualitas dapat menjadi salah satu indikator pemerintahan yang Good Governance yang didasari oleh prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektif serta efisien sehingga kualitas informasi sebuah website dapat menjadi salah satu tolak ukur telah sejauh mana E-Government yang ada pada daerah Kabupaten Jayapura berkembang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Perkembangan website di Kabupaten Jayapura telah mencapai kinerja optimal yang disyaratkan oleh regulasi pemerintahan. Namun, masih terdapat beberapa masalah terkait kualitas informasi yang ada di dalam website. Kualitas informasi adalah salah satu indikator keberhasilan E-Government yang diterapkan di daerah tersebut, dan kualitas website menjadi aspek penting dalam hal ini. Kualitas informasi sangat penting karena informasi menjadi acuan bagi masyarakat dan lembaga pemerintahan dalam membuat keputusan. Selain itu, kualitas informasi juga berpengaruh pada citra yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Salah satu contoh masalah terkait kualitas informasi di website Kabupaten Jayapura adalah ketidaksesuaian antara judul yang disajikan dengan isi yang ditampilkan. Misalnya, judul yang disajikan adalah LPPD 2021, namun isinya adalah LPPD 2020.

Masalah ketidaksesuaian informasi seperti ini dapat menyebabkan pengguna mengakses informasi yang salah dan berkaitan dengan dimensi keakuratan. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan dimensi relevansi, di mana informasi yang disajikan tidak sesuai atau relevan dengan topik atau judul yang diberikan. Selain website Kabupaten Jayapura, penulis juga menganalisis website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura. Dalam pengamatan penulis, terdapat masalah di bagian dokumen unduhan yang tidak terbaru. Hal ini berkaitan dengan dimensi ketepatan waktu, di mana data dan informasi yang disajikan seharusnya selalu terbaru.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Marudur dan Erisva berjudul *E-Government dan aplikasinya di Lingkungan pemerintah daerah (studi kasus kualitas informasi website kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)* (Marudur & Erisva, 2017), menemukan bahwa kualitas informasi website pemerintah kabupaten bengkalis secara umum sudah cukup baik dengan kekurangan yang dapat mengurangi kualitas informasi website ada pada dimensi kelengkapan informasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan

kualitatif. Selanjutnya penelitian Eka Yuda Gunawibawa, Hestin Oktiani, dan Gita Hilmi Prakoso yang berjudul *Analisis Konten Informasi E- Government Pada situs web Pemerintah Kabupaten Pesawaran* (Eka dkk, 2019) menemukan bahwa Situs web Kabupaten Pesawaran sudah hampir memenuhi standar berdasarkan peraturan yang dijadikan rujukan dengan Nilai terendah dalam konten informasi yang wajib disajikan oleh pemerintah kabupaten Pesawaran yaitu identitas nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi. Penelitian Nias Wenda dan Melkior Nikolar N. sitokdana yang berjudul *Analisis Kualitas Informasi Situs Web Pemerintah Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua* (Nias&Melkior,2020) menemukan Pada situs website Pemerintah Kabupaten Yahukimo ditemukan berbagai kelemahan yang berkaitan tentang kualitas informasi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni kualitas informasi website sebagai salah satu dari penerapan *E Government* di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dimana website adalah salah satu media penyampaian informasi paling awal sebelum adanya aplikasi yang dapat di unduh dengan telephone genggam. Metode yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif juga berbeda dengan Marudur Pandapotan Damanik, Erisva Hakiki Purwaningsih maupun Eka Yuda Gunawibawa dkk. Selain itu teori yang digunakan juga berbeda dari penelitian terdahulu yakni teori kualitas informasi menurut (Carlo Batini, 2016) yang memiliki 6 dimensi kualitas informasi yakni *accuracy, completeness, readability, redundancy, accessibility* dan *consistency*.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas informasi aplikasi E-Government di lingkungan pemerintah daerah terkait dengan kualitas informasi website di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dan untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pada aplikasi E-Government di lingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas informasi website Kabupaten Jayapura.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menganalisis kualitas informasi website menggunakan teori kualitas informasi menurut Carlo Batini (2016). metode kualitatif menurut saryono adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan mengenai kualitas pengaruh sosial yang tidak dapat diukur atau digambarkan secara kuantitatif. Selanjutnya penelitian deskriptif menurut (Sukmadinata, 2017), adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena- fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Kualitas informasi menurut Carlo batini (2016) memiliki 6 dimensi yang terbagi lagi menjadi 9 indikator indikator yaitu *Accuracy, currency, timeliness, completeness, Relevancy, understandability, conciseness, availability* dan *Consistency*. Selanjutnya data yang didapatkan dikaitkan dengan model kematangan E-Government menurut Gartner Group (Baum&Maio, 2000). Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data penulis melakukan wawancara terhadap 16 informan yakni sekretaris dinas

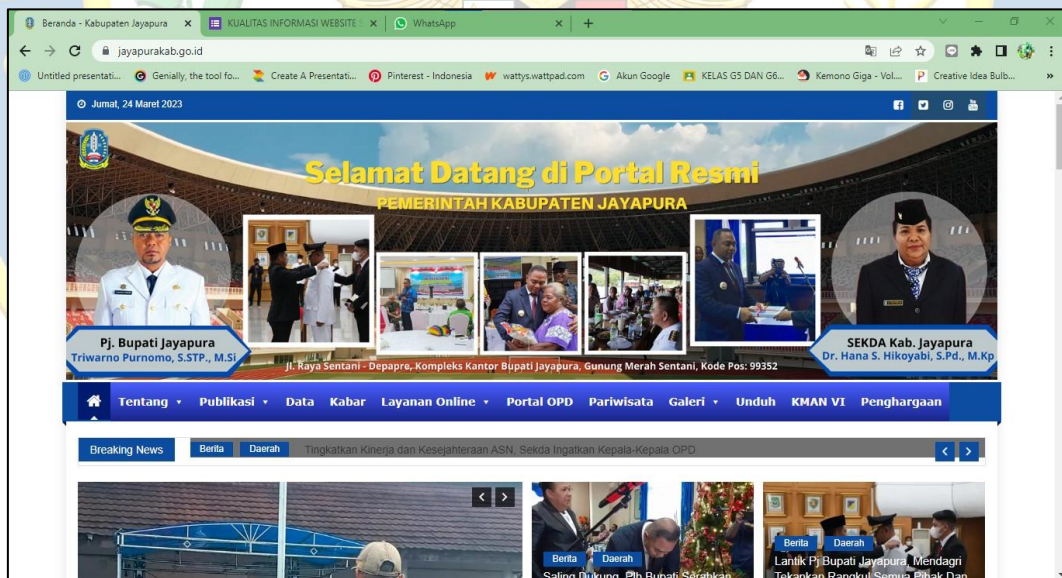
Kominfo Kabupaten Jayapura, Kabid pengelolaan & layanan informasi publik, Kasi Pengembangan infrastruktur, teknologi dan integrasi sistem informasi, Kasi Tata Kelola E-Government, dan Masyarakat daerah Kabupaten Jayapura yang mengakses *website* diskominfo.kabjayapura.go.id dan *website* kabjayapura.go.id. dengan menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling. Pengertian *Purposive Sampling* menurut (sugiyono,2019) adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative, dan snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key informan*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis yang dilakukan penulis bertujuan untuk menjawab terkait dengan rumusan masalah mengenai bagaimana kualitas informasi pada [website diskominfo.jayapurakab.go.id](http://website.diskominfo.jayapurakab.go.id) dan [website jayapurakab.go.id](http://website.jayapurakab.go.id) di lingkungan pemerintah daerah terkait dengan website di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dan apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas informasi website [diskominfo.jayapurakab.go.id](http://website.diskominfo.jayapurakab.go.id) dan [website jayapurakab.go.id](http://website.jayapurakab.go.id) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura.

3.1 Gambaran Umum Website Kabupaten Jayapura

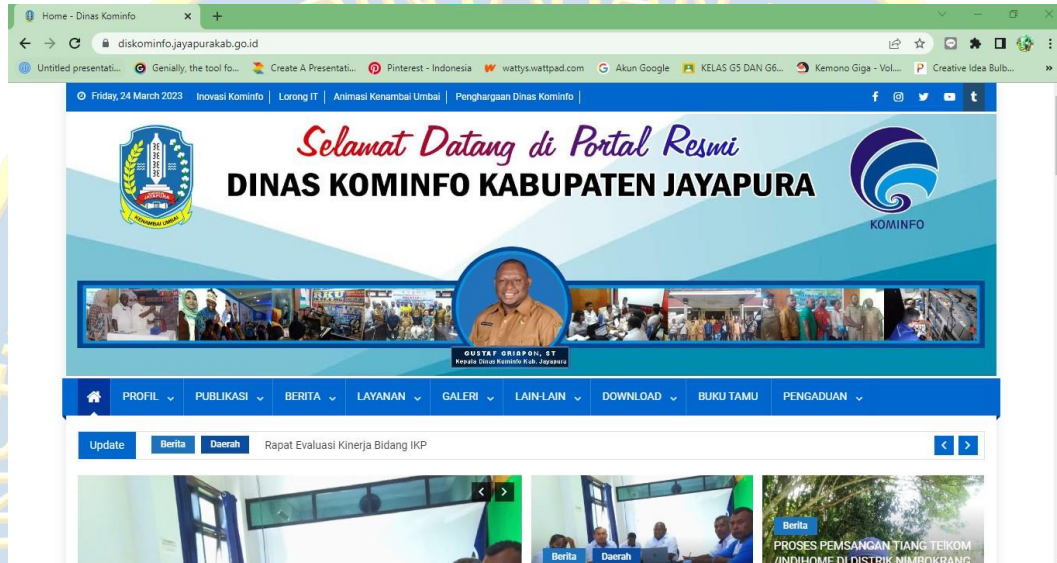
Kabupaten Jayapura memiliki *website* pemerintahan dengan *domain* jayapurakab.go.id yang berada di bawah pengelolaan bagian Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura, Website ini merupakan *website* utama Kabupaten Jayapura dimana untuk masing-masing perangkat daerah juga telah memiliki *websitenya* tersendiri. *website* jayapurakab.go.id dibangun pada tahun 2017 dan menjadi website pertama pemerintah Kabupaten Jayapura pada saat itu. Secara visual, *website* ditunjukkan pada gambar 3.1



Sumber : Jayapurakab.go.id

Gambar 3. 1
Website Pemerintah Kabupaten Jayapura

Website kedua yang menjadi sampel penelitian adalah *website* dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Jayapura yang dapat diakses pada alamat diskominfo.jayapurakab.go.id. *website* ini dikelola secara mandiri oleh Diskominfo Kabupaten Jayapura. Website ini dibentuk pada tahun 2019. Secara umum lingkup tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jayapura adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis dibidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik. menu yang dapat diakses pada *website* ini antara lain Profil, publikasi, berita, layanan, galeri, lain-lain, download, buku tamu dan pengaduan. tampilan halaman depan *website* Diskominfo ditunjukkan pada gambar 3.2



Sumber : diskominfo.jayapurakab.go.id

Gambar 3.2
Tampilan depan *website* diskominfo.jayapurakab.go.id

3.2 Kualitas Informasi pada *website* Kabupaten Jayapura

Subbab ini dianalisis menggunakan teori kualitas informasi menurut Carlo Batini yang memiliki 6 dimensi yakni *accuracy*, *completeness*, *readability*, *redundancy*, *accessibility* dan *consistency*. Kualitas Informasi *website* Kabupaten Jayapura jika dilihat berdasarkan dimensi kualitas Informasi oleh Carlo Batini disajikan dalam tabel :

Tabel 3. 1

Tabulasi Penelitian Berdasarkan Dimensi Dan Indikator Kualitas Informasi

Dimensi	Indikator	Website Pemkab Jayapura	Website Dinas Kominfo
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>accuracy</i>	<i>Accuracy</i>	Setiap dokumen unduhan berasal dari Instansi Resmi.	Berita yang disajikan disertai dengan foto Kegiatan. Setiap dokumen unduhan berasal dari Instansi Resmi.
<i>accuracy</i>	<i>Currency</i>	Informasi diperbaharui antara 15-30 menit saat terjadi kesalahan.	Informasi diperbaharui antara 15-30 menit saat terjadi kesalahan.
	<i>timeliness</i>	Informasi diperharui setiap kali ada kegiatan pimpinan daerah, dokumen unduhan masih banyak yang tidak terbarukan	Informasi diperharui setiap kali ada kegiatan pimpinan daerah, dokumen unduhan cukup terbarukan meski masih terdapat beberapa dokumen unduh yang tidak.
<i>Completeness</i>	<i>Completeness</i>	Informasi yang tersedia sudah lengkap tetapi masih ada masalah Mengenai halaman kosong dan link yang disajikan terdapat kekurangan sehingga tidak dapat dibuka	Telah banyak informasi yang disajikan mulai dari hal Mendasar yang harus ada di website Perangkat Daerah seperti Struktur organisasi dan informasi khusus yang menyangkut tugas Diskominfo Kabupaten Jayapura
<i>Completeness</i>	<i>Relevancy</i>	Informasi yang disajikan sudah bermanfaat dan relevan	Informasi yang disajikan sudah bermanfaat dan relevan

(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Readability</i>	<i>Understand-ability</i>	Informasi Telah dapat dimengerti oleh masyarakat yang membaca	Informasi Telah dapat dimengerti oleh masyarakat yang membaca
<i>Redundancy</i>	<i>conciseness</i>	Informasi yang disajikan jelas dan tidak berbelit- belit	Informasi yang disajikan jelas dan tidak berbelit- belit
<i>Accessibility</i>	<i>availability</i>	Masih terdapat link yang disediakan dalam website memiliki Error code 4xx	Sudah baik tergantung dari jaringan internet.
<i>Consistency</i>		<i>Website</i> Telah digunakan untuk sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.	

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan *E Government* melalui *website* dengan menjelaskan kualitas informasi pada *website* Pemerintah Kabupaten Jayapura. Kualitas informasi dalam *website E Government* memiliki peran penting sebab menjadi media pemberi informasi dan Transparansi kerja dari pemerintah Daerah. Informasi yang disampaikan dalam *website* resmi pemerintah akan dianggap valid oleh masyarakat sehingga apabila informasi yang disampaikan tidak benar akan berakibat pada menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi terhadap *webite*, penerapan *E Government* di Kabupaten Jayapura dapat dikategorikan dalam tahap *presence* menuju tahap interaktif. Sesuai dengan pendapat Baum dan Maio (2000) dimana pada tahap ini *website* masih terbatas dalam pemberian informasi dan belum memiliki ruang bagi publik untuk berinteraksi secara online dengan elemen pemerintah.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kualitas informasi dalam *website E-Government* memiliki peran yang penting karena *website* tersebut menjadi sumber informasi dan sarana transparansi kerja pemerintah daerah. Informasi yang disampaikan melalui *website* resmi pemerintah dianggap sebagai informasi yang valid oleh masyarakat. Oleh karena itu, jika informasi yang disampaikan tidak akurat, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Berdasarkan analisis pada dimensi-dimensi yang telah dijelaskan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyajian informasi di *website* Pemerintah Kabupaten Jayapura. Dalam dimensi keakuratan, informasi yang disajikan dalam kedua *website* tersebut dapat dianggap akurat karena didapatkan dari instansi-instansi yang terkait. Namun, masih terdapat masalah dalam hal pembaruan informasi yang belum dilakukan dengan baik. Berbeda dengan temuan penelitian Marudur & Erisva(2017)

dimana pada dimensi kebaruaran, dari 4 website yang diteliti 3 diantaranya telah baik. Pada dimensi kelengkapan, terdapat kekurangan dalam hal link yang tidak mengarahkan ke halaman yang seharusnya. Hal ini disebabkan oleh masih dalam tahap pengembangan website dan kurangnya staf ahli serta anggaran yang memadai. Selain itu, ada juga kekurangan dalam hal relevansi informasi yang masih belum lengkap. Masyarakat yang menjadi informan menyatakan bahwa website tersebut sudah bermanfaat untuk mencari informasi terkait Kabupaten Jayapura, namun terdapat juga beberapa yang belum mengetahui keberadaan website tersebut. Temuan ini sama dengan temuan peneliti Nias Wenda Dkk (2020) yang meneliti kualitas informasi website Pemerintah Kabupaten Yahukimo dimana pada dimensi ini Website pemKab Yahukimo masih ditemukan kekurangan. Selanjutnya Dalam dimensi keterjangkauan, website Dinas Komunikasi dan Informasi sudah dapat diakses dengan baik, namun website Pemerintah Kabupaten Jayapura masih mengalami error dan menu yang tidak dapat diakses. Masalah ini disebabkan oleh website Pemerintah Kabupaten Jayapura yang masih dalam tahap pengembangan dan belum dilakukan peremajaan. terakhir Dalam dimensi konsistensi, pemerintah Kabupaten Jayapura telah menunjukkan konsistensinya dalam menggunakan kedua website tersebut sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat dengan menyajikan berita terkini. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui keberadaan website tersebut. Perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan manfaat dari kedua website tersebut.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Kualitas Informasi pada website Kabupaten Jayapura dapat dikatakan baik meski masih ada yang harus diperbaiki seperti pada pada Website jayapurakab.go.id yang mana ditemukan kekurangan pada dimensi accuracy (indikator timeliness dan currency), dimensi completeness dan dimensi Accessibility. Untuk website diskominfo.jayapurakab.go.id yang belum memenuhi standar adalah indikator timeliness pada dimensi accuracy. Kualitas informasi pada website Kabupaten Jayapura dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana terdapat faktor pendukung yakni telah adanya konsistensi pemerintah daerah untuk menjadikan website resmi pemerintah daerah menjadi salah satu media penyampaian informasi, telah adanya kerjasama antar pihak ketiga untuk memperlancar penyampaian informasi melalui website dan memiliki SOP yang dapat dipedomani sehingga pekerjaan mengelola website dapat lebih terstruktur. Selain faktor pendukung, adapun faktor penghambat yang mempengaruhi kualitas dari website Kabupaten Jayapura yaitu kurangnya koordinasi antara perangkat daerah untuk memenuhi data yang berada dalam website, kurangnya anggaran untuk pengelolaan website, kurangnya staff ahli dalam mengelola website, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan keberadaan website resmi Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Dinas saja sebagai lokasi penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang lebih bervariasi berkaitan dengan Kualitas informasi website di Kabupaten Jayapura untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Batini, C. dan M. Scannapieco. 2016. *Data and Information Quality: Dimensions, Principles and Techniques*. Switzerland : Springer International Publishing
- Baum, C., & Maio, A. D. (2000). *Gartner's Four Phases of EGovernment Model*. Stamford: Gartner Group Inc.
- Damanik, M. P. 2017. “ E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)”, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol. 21
- Gunawibawa, E. Y., dkk. 2019. “ *Analisis Konten Informasi E-Government pada Situs Web Pemerintah Kabupaten Pesawaran* “, SEFILIA, ISBN :978-623-91972-0-9
- Sitokdana, M. dan N. Wenda. 2020. “*Analisis Kualitas Informasi Situs Web Pemerintah Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua*”, SEMNASIF 2020
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Wiratmo, L. B., Irfan, N., & Kuwatono. (2017). Website Pemerintah Daerah sebagai Sarana Online Public Relations. *Jurnal ASPIKOM*, 3(2), 326–339.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. (2008). *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003. (2003). *Kebijakan Dan Pengembangan E-Government*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.